

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS DI WILAYAH AGLOMERASI JOGLOSEMAR

Muh Rizal Khoirudin¹, Melysa Olga Ivana Taku Bessi², Devira Putri Ferdiana³, Deby Febriyan Eprilianto⁴

Email: muhrizal.23081@mhs.unesa.ac.id¹, melysa.23071@mhs.unesa.ac.id²,
devira.23073@mhs.unesa.ac.id³, debyeprilianto@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak: *Konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, Jogja, Solo, dan Semarang belum terintegrasi secara optimal meskipun ketiga wilayah ini merupakan wilayah segitiga emas dengan berbagai potensi yang dimiliki. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, serta merumuskan strategi penguatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Collaborative Public Management oleh Agranoff dan McGuire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama belum terintegrasi secara optimal masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi, perbedaan prioritas, dan lemahnya dukungan regulasi nasional. Efektivitas kerja sama ini masih terbatas. Strategi penguatan meliputi pembentukan lembaga koordinatif lintas wilayah, memprioritaskan penguatan infrastruktur transportasi serta integrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi.*

Kata Kunci: *Kerja Sama, Konektivitas, Mobilitas, Joglosemar.*

Abstract: *Connectivity and mobility in the Joglosemar agglomeration region, Jogja, Solo, and Semarang, have not been optimally integrated even though these three regions are golden triangle regions with various potentials. This research aims to identify the forms, challenges, and effectiveness of inter-regional cooperation in improving connectivity and mobility in the Joglosemar agglomeration region, as well as formulate a strengthening strategy. This research is a descriptive qualitative research with documentation study data collection techniques. The theory used in this research is Collaborative Public Management theory by Agranoff and McGuire. The results showed that the form of cooperation has not been optimally integrated and still faces challenges, such as lack of coordination, differences in priorities, and weak national regulatory support. The effectiveness of this cooperation is still limited. Strengthening strategies include the establishment of cross-regional coordinating institutions, prioritizing the strengthening of transportation infrastructure and integration, as well as increasing the capacity of human resources and technology.*

Keywords: *Cooperation, Connectivity, Mobility, Joglosemar.*

PENDAHULUAN

Wilayah aglomerasi Joglosemar, Jogja, Solo, dan Semarang, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia merupakan wilayah segitiga emas. Wilayah ini turut menjadi pusat perkembangan ekonomi dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, konektivitas dan mobilitas di wilayah ini belum terintegrasi secara optimal.

Pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai prioritas nasional untuk mendukung konektivitas di wilayah Joglosemar. Proyek Strategi Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pembangunan tol ini akan menghubungkan pelabuhan di utara dengan industri di selatan Jawa, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang juga termasuk dalam Kawasan Strategis Ekonomi Nasional (KSE). Salah satu arah pembangunan jangka panjang nasional yang

tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang yang diarahkan salah satunya adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dalam negeri (Talita & Eko Prakoso, 2018).

Rencana pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama di wilayah aglomerasi joglosemar adalah pembentukan lembaga koordinatif lintas wilayah aglomerasi yang berbasis regulasi nasional. Diharapkan mampu merumuskan kebijakan bersama, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, serta mengawasi pelaksanaan proyek strategis di kawasan Joglosemar.

Wilayah Joglosemar, yang meliputi Yogyakarta, Solo, dan Semarang kerap disebut sebagai segitiga emas karena potensinya yang luar biasa dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan budaya, Selaras dengan yang diungkapkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, meski kawasan ini memiliki peluang besar untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan mobilitas antar daerahnya masih jauh dari kata ideal. Infrastruktur transportasi yang belum benar-benar mendukung pergerakan orang, barang, atau jasa secara efisien sehingga memperlambat perkembangan ekonomi wilayah ini. Selain itu, dalam kerja sama antar daerah untuk mengelola pembangunan infrastruktur dan menyusun kebijakan masih bersifat terpisah-pisah, kurang terkoordinasi, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Proyek besar seperti Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawean. Seperti belum adanya dukungan regulasi secara nasional yang menjadi hambatan untuk membuat kebijakan yang terpadu.

Oleh karena itu penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi penguatan kerja sama antar daerah guna mewujudkan integrasi konektivitas dan mobilitas wilayahnya bisa lebih baik, berkelanjutan, dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Adapun peneliti menggunakan kerangka collaborative public management oleh Agranoff dan McGuire sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar.

Dalam penelitian ini, model kolaboratif ini membuka peluang bagi terwujudnya kerja sama lintas daerah, khususnya dalam upaya mengintegrasikan sistem transportasi, pengembangan infrastruktur, ekonomi, pariwisata. Melalui pendekatan ini, setiap daerah didorong untuk menyelaraskan kebijakan serta membangun sinergi, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar secara menyeluruh.

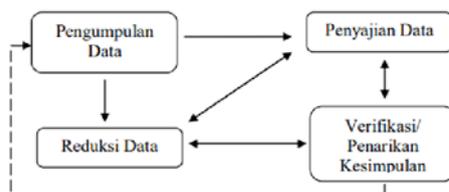
Dengan demikian, penelitian ini menggunakan kerangka collaborative public management oleh Agranoff dan McGuire sebagai landasan penting dalam merumuskan strategi kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor dan wilayah

METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian kerja sama antar daerah di wilayah Joglosemar, instrumen studi literatur dirancang secara sistematis untuk memastikan data yang relevan, valid, dan reliabel. Instrumen utama berupa protokol analisis dokumen digunakan untuk mengkaji jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen perencanaan strategis, dengan fokus pada kebijakan konektivitas, tantangan koordinasi, strategi penguatan kolaborasi, dan teori pendukung seperti Collaborative Public Management. Dokumen dipilih berdasarkan relevansi, aktualitas (2015–2025), dan kredibilitas sumber, seperti Google Scholar,

Researchgate, dan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk literatur dari Talita & Prakoso (2018) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang Tahun 2025. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian sistematis dengan kata kunci seperti “kolaborasi antar daerah” dan “infrastruktur Joglosemar,” diikuti pengelompokan tematik dan analisis konten kualitatif, dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga menghasilkan temuan yang konsisten. Instrumen ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika kerja sama antar daerah, menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk optimalisasi konektivitas dan mobilitas di Joglosemar.



Gambar 1. Model analisis data Miles dan Huberman

Sumber: Researchgate Alur Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

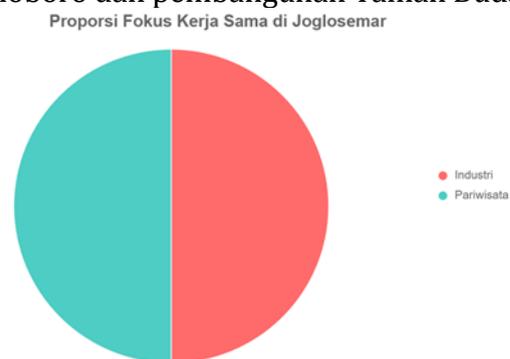
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tabel 1. Literatur

No	Literatur	Oleh	Isi Literatur	Dipilih karena	Digunakan untuk apa
1.	Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, Semarang)	Talita, K. M., & Prakoso, B. S. E. (2018)	Kajian perekonomian wilayah, untuk mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah dan membandingkan perekonomian wilayah di Kota Jogjakarta, Solo, dan Semarang.	Ada kaitannya dengan Joglosemar	Untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, serta merumuskan strategi penguatan
2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta	Informasi terkait prioritas pembangunan Kota Yogyakarta, dsb.	Untuk menggali informasi terkait wilayah Yogyakarta	untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, serta merumuskan strategi penguatan
3.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025	Pemerintah Daerah Kota Surakarta	Informasi terkait prioritas pembangunan Kota Surakarta, dsb.	Untuk menggali informasi terkait wilayah Surakarta	untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, serta merumuskan strategi penguatan.
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025	Pemerintah Daerah Kota Semarang	Informasi terkait prioritas pembangunan Kota Semarang	Untuk menggali informasi terkait wilayah Semarang	untuk mengidentifikasi bentuk, tantangan, dan efektivitas kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar, serta merumuskan strategi penguatan.

2. A. Bentuk Kerja Sama Antar Daerah Di Wilayah Joglosemar

Kerja sama antar daerah di wilayah Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang) merupakan bagian dari upaya pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Terpadu dalam Kawasan Strategis Ekonomi (KSE). Menurut Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar", kawasan Joglosemar telah ditetapkan sebagai kawasan andalan sejak dekade 1980 berdasarkan Instruksi Gubernur No. 530/32/1987 dan SK Gubernur Jawa Tengah No. 530.05/48/1987, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mempersempit ketimpangan regional. Bentuk kerja sama ini mencakup pengembangan kawasan industri, di mana Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama untuk menjadikan Joglosemar sebagai titik penggerak perekonomian. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi fokus, terutama di Yogyakarta, sebagaimana diungkapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2025. Dokumen tersebut menyebutkan kerja sama antara Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dengan stakeholder terkait untuk melestarikan cagar budaya dan mengembangkan pariwisata, seperti melalui penataan ulang kawasan Malioboro dan pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan.



Gambar 2. Grafik Proporsi Fokus Kerjasama di Joglosemar.

Sumber : Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar" dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2025.

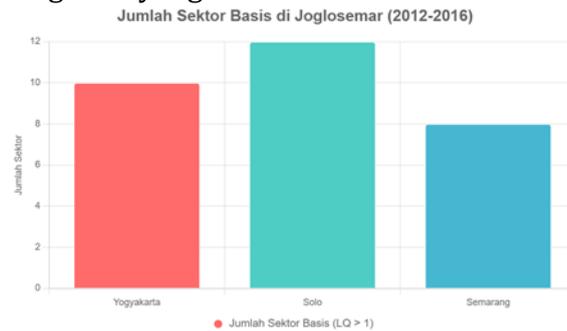
Namun, kerja sama ini masih terbatas pada sektor tertentu dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Dalam Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar" menunjukkan bahwa meskipun Joglosemar memiliki potensi ekonomi yang besar, implementasi kerja sama antar daerah belum optimal karena kurangnya tindak lanjut pada rencana pengembangan kawasan industri. Sementara itu, di sektor pariwisata, Yogyakarta telah menunjukkan kemajuan dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya, seperti melalui program rintisan kelurahan budaya (RKB).

3. B. Tantangan Kerja Sama Antar Daerah

Tantangan utama dalam kerja sama antar daerah di wilayah Joglosemar adalah kurangnya koordinasi yang efektif. Kebijakan antar daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri, yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan proyek besar. Misalnya, meskipun proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo telah direncanakan, implementasinya terhambat oleh kurangnya dukungan regulasi nasional yang terpadu. Hal ini sejalan dengan temuan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya mendukung integrasi antar wilayah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan perencanaan transportasi.

Selain itu, tantangan dalam kerja sama antar daerah di Joglosemar adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah. Berdasarkan Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar", Kota Solo memiliki 12 sektor basis (dengan nilai LQ > 1), menunjukkan kemampuan ekspor yang kuat, sementara Yogyakarta mengalami penurunan sektor basis dan peningkatan sektor non-basis antara 2012-2016, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam kontribusi ekonomi. Semarang, meskipun memiliki delapan sektor basis, juga menghadapi tantangan dengan sektor primer seperti

pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif (-8,06%). Ketimpangan ini memengaruhi efektivitas kerja sama, karena masing-masing daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda.



Gambar 3. Grafik Jumlah Sektor Basis di Joglosemar (2012-2016)

Sumber : Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar"

4. C. Efektivitas Kerja Sama Antar Daerah

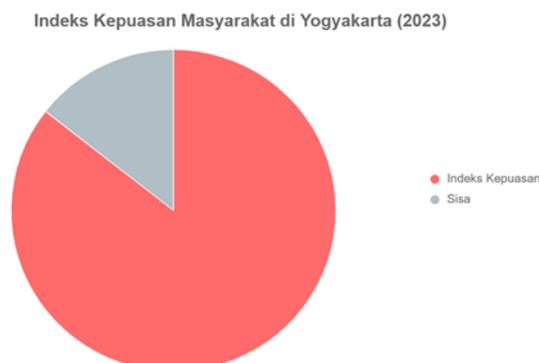
Efektivitas kerja sama antar daerah di Joglosemar masih terbatas. Dalam Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar" menunjukkan bahwa Indeks Keseimbangan Pertumbuhan Antar Sektor (Balanced Growth Index) di ketiga kota mendekati nol (Solo: 0,45; Jogjakarta: 0,52; Semarang: 0,69), yang mengindikasikan pertumbuhan antar sektor yang relatif seimbang. Namun, Semarang memiliki nilai tertinggi (0,69), menunjukkan ketidakseimbangan yang lebih besar dibandingkan Solo dan Yogyakarta, terutama karena penurunan sektor primer.



Gambar 4. Grafik Indeks Keseimbangan Pertumbuhan di Joglosemar (2023)

Sumber : Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar"

Sementara itu, dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 mencapai keberhasilan dalam pengelolaan budaya, dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT pengelolaan kawasan cagar budaya mencapai 85,56 pada 2023, didukung oleh penataan ulang kawasan Malioboro. Namun, keberhasilan ini lebih bersifat lokal dan belum terintegrasi dengan kerja sama lintas wilayah di Joglosemar.



Gambar 5. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di Yogyakarta (2023)

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025

Berdasarkan analisis, efektivitas kerja sama ini masih terbatas karena kurangnya lembaga koordinatif yang memiliki otoritas lintas wilayah. Hal ini sejalan

dengan kerangka collaborative public management dari Agranoff dan McGuire (2003), di mana keberhasilan kerja sama antar daerah sangat bergantung pada adanya struktur tata kelola yang jelas dan koordinasi yang kuat. Tanpa adanya regulasi nasional yang mendukung, kerja sama di Joglosemar cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

5. D. Strategi Penguatan Kerja Sama Antar Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, diperlukan beberapa strategi. Pertama, pembentukan lembaga koordinatif lintas wilayah yang berbasis regulasi nasional dapat menjadi solusi. Dalam Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar" menyarankan penguatan sektor sekunder dan tersier untuk mendukung pengembangan KSE di koridor Jawa, yang dapat difasilitasi oleh lembaga tersebut. Lembaga ini dapat menyusun kebijakan terpadu, mengelola anggaran bersama, dan memastikan integrasi sektor pariwisata dan industri antar daerah.

Kedua, penguatan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya seperti yang dilakukan di Yogyakarta dengan potensi di Solo dan Semarang. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2025. menyebutkan pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai wadah ekspresi seni budaya dan peluang pariwisata baru. Strategi ini dapat diperluas dengan membuat jaringan destinasi pariwisata terpadu di Joglosemar, seperti menghubungkan Malioboro (Yogyakarta) dengan kawasan industri dan budaya di Solo dan Semarang.

Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian budaya harus diperluas. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2025 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi berkontribusi pada keberhasilan program budaya, seperti melalui rintisan kelurahan budaya (RKB). Pendekatan ini dapat direplikasi di Solo dan Semarang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kerja sama antar daerah.



Gambar 6. Grafik Proporsi Fokus Strategi Penguatan Kerja Sama

Sumber : Jurnal "Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar" dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2025.

6. E. KAITAN DENGAN PENGETAHUAN DAN TEORI YANG ADA

Temuan ini sejalan dengan teori collaborative public management dari Agranoff dan McGuire (2003), yang menekankan pentingnya koordinasi, komitmen bersama, dan dukungan regulasi dalam kerja sama antar daerah. Dalam konteks Joglosemar, kurangnya regulasi nasional menjadi hambatan utama, sebagaimana yang ditemukan dalam studi ini. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori pusat pertumbuhan (growth pole) dari Perroux (1955), yang menyatakan bahwa kawasan strategis seperti Joglosemar dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika didukung oleh konektivitas yang baik. Namun, tanpa koordinasi yang efektif, potensi ini tidak dapat dimaksimalkan.

7. F. Modifikasi Teori Dan Implikasi

Berdasarkan temuan, teori collaborative public management dapat dimodifikasi dengan menambahkan elemen "regulasi nasional sebagai prasyarat" untuk memastikan keberhasilan kerja sama antar daerah di negara berkembang seperti Indonesia. Implikasi dari modifikasi ini adalah perlunya kebijakan nasional yang lebih proaktif dalam mendukung kerja sama antar daerah, khususnya di kawasan strategis seperti Joglosemar. Dengan adanya regulasi yang jelas, konektivitas dan mobilitas dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerja sama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah aglomerasi Joglosemar bersifat koordinatif melalui penyelarasan-penyelarasan. Implementasi kerja sama masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal, seperti anggaran, dsb. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi belum mencerminkan kolaborasi yang maksimal.

Adapun analisis terhadap prioritas tiap daerah di wilayah aglomerasi Joglosemar menunjukkan fokus yang berbeda dalam peningkatan konektivitas dan mobilitas. Temuan ini berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen terkait lainnya. Perbedaan mencerminkan ketidakselarasan visi tiap daerah yang dapat menghambat integrasi.

Meskipun kawasan aglomerasi Joglosemar memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa konektivitas dan mobilitas antar daerah di kawasan ini masih jauh dari kata ideal. Salah satu penyebab utamanya adalah infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya mendukung pergerakan orang, barang, maupun jasa secara efisien. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini kerap menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan lahan, yang akhirnya berdampak pada lambatnya pembangunan akses transportasi massal. Kondisi ini pada akhirnya memperlambat perkembangan ekonomi dan menurunkan daya saing kawasan Joglosemar sebagai segitiga emas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang inovatif. Salah satunya strategi pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan transportasi, seperti penerapan sistem informasi transportasi terintegrasi dan digitalisasi layanan publik. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KESIMPULAN

Kerja sama antar daerah di Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang) sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas kawasan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan utama seperti kurangnya koordinasi, perbedaan prioritas, dan lemahnya dukungan regulasi nasional. Bentuk kerja sama yang ada meliputi pengembangan infrastruktur transportasi dan pariwisata, tetapi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi optimal. Efektivitas kerja sama terbatas karena belum ada lembaga koordinatif lintas wilayah yang kuat.

Untuk memperkuat kerja sama tersebut, diperlukan strategi yang efektif seperti pembentukan lembaga koordinatif lintas wilayah, percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung integrasi sistem transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Talita, K. M., & Prakoso, B. S. E. (2018). Studi Komparatif Ekonomi Wilayah di Kawasan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, Semarang). *Jurnal Bumi Indonesia*. Diakses pada 29 April 2025 melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/295176843.pdf>
- Kemendagri/Baparekraf RI. 2024. Potensi Kawasan Joglosemar, Jelajah Wisata Sejarah dan Budaya. Kemendagri. Diakses pada 29 April 2024 melalui <https://kemendagri.go.id/kebijakan/potensi-kawasan-joglosemar-jelajah-wisata-sejarah-dan-budaya>
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press. Diakses pada 20 Mei 2025 melalui https://repository.unair.ac.id/125620/1/20.%20Collaborative%20Governance_ebook.pdf
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1.2 (2024): 77-84. Diakses pada 21 Mei 2025 melalui <https://sg.docworkspace.com/d/sIHe42qGVAaeWtcEG>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). Konektivitas dan Mobilitas: Penguatan Kerja

Sama Antar Daerah di Wilayah Aglomerasi. Trans Utama Edisi 04. Diakses pada 21 Mei 2025 melalui <https://transmediakemenhub.id/trans-utama-edisi-04/trans-utama-e4-01-2024>

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2024). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Diakses pada 23 Mei 2025 melalui <https://bpkad.jogjakota.go.id/assets/instansi/bpkad/files/rencana-kerja-pemerintah-daerah-tahun-2025-16509.pdf>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.